

PENGARUH AKSES KREDIT PERBANKAN DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL DI PROVINSI BALI

**I Gusti Made Surya Baskara Bagiana¹, I Gusti Ayu Made Agung Mas Andriani Pratiwi², I Komang Trisna
Eka Putra³**

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tabanan
Tabanan, Bali, Indonesia

³Jurusan Administrasi Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wira Bhakti
Denpasar, Bali, Indonesia

e-mail: gungsurya1313@gmail.com, gungmasp@gmail.com², komangeka9@gmail.com³

Received : September, 2025	Accepted : September, 2025	Published : September, 2025
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Abstract

Local economic empowerment in Bali faces significant challenges, particularly concerning banking credit access and the utilization of financial technology (fintech). This study aims to explore the impact of these two factors on the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The methodology employed is a literature review, encompassing insights from various relevant sources such as articles, books, and online information. The findings indicate that although the distribution of People's Business Credit (KUR) continues to rise, the dominance of the consumptive sector in credit distribution highlights the need for diversification for more sustainable growth. Fintech serves as a crucial tool in enhancing financial access for MSMEs, enabling them to apply for loans more easily and quickly. Case studies demonstrate how fintech, particularly online lending platforms, can boost the production and marketing of MSMEs. However, challenges such as gaps in digital financial literacy and consumer protection issues must be addressed. This research recommends the need for more focused policies to enhance financial literacy, simplify credit access, and strengthen regulations related to fintech. With these measures, it is anticipated that local economic empowerment in Bali can be effectively achieved, creating a more prosperous and competitive society in the digital era.

Keywords: Credit Access, Financial Technology, Local Economic Empowerment, MSMEs

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi lokal di Provinsi Bali menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan akses kredit perbankan dan penggunaan teknologi finansial (fintech). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari kedua faktor tersebut terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode yang digunakan adalah literature review, yang mencakup ulasan dari berbagai sumber pustaka yang relevan seperti artikel, buku, dan informasi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus meningkat, dominasi sektor konsumtif dalam penyaluran kredit menunjukkan perlunya diversifikasi untuk pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Fintech berfungsi sebagai alat penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi UMKM, memungkinkan mereka untuk mengajukan pinjaman dengan lebih mudah dan cepat. Studi kasus menunjukkan bagaimana fintech, seperti platform pinjaman online, dapat meningkatkan produksi dan pemasaran UMKM. Namun, tantangan seperti kesenjangan literasi keuangan digital dan isu perlindungan konsumen perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih

terfokus untuk meningkatkan literasi keuangan, menyederhanakan akses kredit, dan memperkuat regulasi terkait fintech. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemberdayaan ekonomi lokal di Provinsi Bali dapat tercapai secara efektif, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi di era digital.

Kata Kunci: Akses Kredit, Teknologi Finansial, Pemberdayaan Ekonomi Lokal, UMKM

1. PENDAHULUAN

Akses kredit perbankan dan penggunaan teknologi finansial (fintech) menjadi komponen kunci dalam pengembangan ekonomi lokal. Akses keuangan yang memadai membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis, berinovasi, dan meningkatkan daya saing (Pratiwi dan Suarbawa, 2024). Dalam konteks ekonomi lokal, terutama di daerah dengan potensi ekonomi seperti Provinsi Bali, hal ini sangat relevan. Akses kredit yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan UMKM, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat (Adi, 2025).

Kondisi perekonomian di Provinsi Bali menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sektor pariwisata. Sektor ini menjadi sumber utama pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan kerentanan. Fluktuasi dalam jumlah wisatawan, terutama akibat pandemi COVID-19, telah menunjukkan betapa rentannya ekonomi Bali terhadap perubahan eksternal. Penurunan drastis dalam pendapatan dari sektor pariwisata menekankan perlunya diversifikasi ekonomi untuk menciptakan ketahanan yang lebih baik (Hidayani et al., 2020).

Fintech muncul sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan akses keuangan. Melalui platform digital, fintech dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Penerapan fintech di Bali memberikan harapan baru bagi pelaku UMKM, memungkinkan mereka untuk memperoleh modal dengan lebih cepat dan efisien (Kusuma & Asmoro, 2021). Integrasi teknologi dalam sektor keuangan ini menjadi langkah penting untuk memperbaiki inklusi keuangan di masyarakat (Pratiwi, 2022).

Tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan akses kredit dan fintech di Bali cukup signifikan.

Tingkat literasi keuangan yang masih rendah menjadi penghambat utama. Banyak pelaku usaha yang tidak memahami cara menggunakan layanan keuangan modern secara optimal. Hal ini menyebabkan mereka melewatkan peluang yang dapat meningkatkan kinerja usaha mereka (Dwiastuti & Suardana, 2020).

Ketimpangan ekonomi juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Bali Selatan mengalami pertumbuhan yang pesat, sementara Bali Utara dan Timur tertinggal. Ketidakmerataan ini menciptakan tantangan dalam upaya pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana akses kredit dan fintech dapat berkontribusi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Bali (Siregar et al., 2023).

Akses kredit perbankan di Bali masih menghadapi berbagai kendala. Proses pengajuan kredit yang rumit dan birokrasi yang panjang sering kali menghalangi pelaku usaha untuk mendapatkan dukungan keuangan yang diperlukan. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akses kredit dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi lokal (Wardani & Darmawan, 2020).

Fintech menawarkan model pembiayaan alternatif yang lebih sederhana. Namun, adanya skeptisisme di kalangan masyarakat terhadap keamanan dan privasi data menjadi tantangan tersendiri. Persepsi negatif ini dapat menghambat adopsi fintech di kalangan pelaku usaha (Beck & Demirguc-Kunt, 2006). Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang persepsi masyarakat terhadap penggunaan fintech.

Kebijakan pemerintah juga berperan penting dalam mendorong akses kredit dan pemanfaatan fintech. Rekomendasi kebijakan yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan UMKM. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi

pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal di Provinsi Bali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang ekonomi pembangunan, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi masalah yang dihadapi masyarakat Bali. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan perspektif ekonomi, sosial, dan teknologi diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang isu yang dihadapi.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis pengaruh akses kredit perbankan terhadap pemberdayaan ekonomi lokal di Provinsi Bali; (2) Menganalisis pengaruh penggunaan teknologi finansial terhadap pemberdayaan ekonomi lokal di Provinsi Bali; dan (3) Menganalisis interaksi antara akses kredit perbankan dan penggunaan teknologi finansial dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal di Provinsi Bali.

KAJIAN PUSTAKA

Akses Kredit Perbankan

Akses kredit perbankan merupakan komponen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kredit memungkinkan pelaku ekonomi, terutama UMKM, untuk mendapatkan modal yang diperlukan dalam pengembangan usaha. Keberadaan akses kredit yang baik berdampak langsung pada kapasitas produksi dan daya saing di pasar (Adi, 2025). Tanpa akses yang memadai, banyak pelaku usaha terjebak dalam keterbatasan dan sulit untuk berinovasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi akses kredit di Bali sangat beragam. Karakteristik peminjam, seperti riwayat kredit dan reputasi, menjadi pertimbangan utama bagi lembaga perbankan. Selain itu, kondisi usaha yang baik, seperti potensi pertumbuhan dan manajemen yang efisien, menjadi faktor penentu dalam evaluasi aplikasi kredit (Kusuma & Asmoro, 2021). Sementara itu, persyaratan jaminan yang seringkali menjadi hambatan bagi UMKM juga harus diperhatikan.

Kebijakan pemerintah dan regulasi yang mendukung akses kredit sangat penting untuk

meningkatkan inklusi keuangan. Program-program yang bertujuan memberikan pelatihan dan dukungan bagi pelaku usaha kecil dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam mengakses kredit. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor tersebut dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi lokal di Bali.

Teknologi Finansial (Fintech)

Teknologi Finansial (fintech) telah merevolusi cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Fintech menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam transaksi keuangan, yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh banyak orang. Dalam konteks ekonomi lokal, fintech memberikan peluang bagi UMKM untuk mendapatkan pendanaan dengan cepat dan tanpa birokrasi yang rumit (Hadayani et al., 2020).

Jenis-jenis fintech yang relevan untuk masyarakat Bali mencakup layanan pembayaran digital, pinjaman *peer-to-peer*, dan *crowdfunding*. Pembayaran digital memudahkan transaksi non-tunai yang semakin diperlukan dalam era digital. Pinjaman *peer-to-peer* memungkinkan individu atau usaha kecil untuk mendapatkan akses ke modal dari investor secara langsung, tanpa melibatkan bank sebagai perantara (Siregar et al., 2023). *Crowdfunding* menawarkan alternatif bagi pelaku usaha untuk mengumpulkan dana dari masyarakat luas untuk proyek-proyek tertentu.

Peran fintech dalam meningkatkan akses keuangan sangat signifikan, terutama di daerah dengan infrastruktur keuangan yang terbatas. Fintech mampu menjangkau masyarakat di wilayah terpencil yang sebelumnya terpinggirkan dari layanan keuangan tradisional. Penelitian ini akan menganalisis efek penggunaan fintech terhadap pemberdayaan ekonomi lokal di Bali, serta tantangan yang dihadapi dalam adopsinya.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pemberdayaan ekonomi lokal didefinisikan sebagai proses meningkatkan kapasitas individu dan komunitas untuk mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Proses ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dalam pengambilan

keputusan ekonomi. Indikator-indikator pemberdayaan ekonomi lokal meliputi peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan akses terhadap sumber daya (Rodriguez-Pose & Timstra, 2005).

Hubungan antara akses kredit, fintech, dan pemberdayaan ekonomi lokal sangat erat. Akses kredit yang baik memungkinkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, sementara penggunaan fintech dapat mempercepat proses peminjaman dan mengurangi biaya transaksi. Kombinasi dua faktor ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal (Kosasih, 2019).

Teori yang relevan dalam konteks ini adalah Teori Pembangunan Berkelanjutan, yang menekankan pentingnya integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi lokal tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga melibatkan pemberdayaan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana akses kredit dan fintech dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal di Provinsi Bali.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan *literature review*. Materi berupa ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka (artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain) tentang topik yang sedang dibahas merupakan bagian dalam penulisan *literature review*. Penulisan yang bersifat relevan, mutakhir, dan memadai merupakan cerminan dari penulisan Literature review yang baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akses Kredit Perbankan di Provinsi Bali

Data terkini menunjukkan bahwa penyaluran kredit perbankan di Provinsi Bali terus mengalami pertumbuhan yang positif. Pada semester I tahun 2025, realisasi penyaluran kredit mencapai Rp115,82 triliun, meningkat 6,82% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (OJK, 2025). Sebanyak 51,22% dari kredit perbankan di Bali disalurkan kepada debitur pelaku usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) (OJK, 2025). Kinerja positif ini menjadi modal tersendiri bahwa UMKM masih mendominasi penyerapan kredit. Dari sisi penggunaan, pertumbuhan kredit didorong peningkatan kredit investasi mencapai 14,08% dan kredit modal mendominasi penyaluran kredit (OJK, 2025). Pertumbuhan kredit investasi yang tumbuh double digit artinya keyakinan masyarakat Bali terhadap masa depan itu positif (OJK, 2025).

Meskipun demikian, terdapat beberapa catatan penting. Sektor konsumtif masih mendominasi penyaluran kredit, mencapai 33,64%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 28,06% (OJK, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran kredit ke sektor produktif masih perlu ditingkatkan untuk mendukung diversifikasi ekonomi Bali. Selain itu, rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat sebesar 3,08%, menunjukkan bahwa kualitas kredit perbankan di Bali masih terjaga (OJK, 2025). Namun, rasio kredit terhadap simpanan (LDR) secara agregat di Bali secara umum pada posisi Juni 2025 mencapai 57,84% (OJK, 2025).

Hambatan dan tantangan dalam akses kredit masih menjadi isu krusial bagi UMKM di Bali. Persyaratan yang ketat, kurangnya informasi mengenai program kredit, dan rendahnya literasi keuangan menjadi beberapa faktor penghambat (Komisi VI DPR RI, 2025). Banyak pelaku UMKM yang kesulitan memenuhi persyaratan administrasi dan jaminan yang diminta oleh bank (Radar Bali, 2022). Selain itu, persaingan yang ketat dan kerumitan dalam administrasi juga mempersulit UMKM untuk mendapatkan akses modal (Nusa Bali, 2022). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah dan OJK telah berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan UMKM melalui berbagai pelatihan dan pendampingan (Dekranasda Provinsi Bali, 2025).

Pemerintah juga berupaya untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM melalui berbagai program dan regulasi. OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM (OJK, 2025). Regulasi ini diharapkan dapat membuat UMKM semakin berdaya saing, sekaligus berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional (Bali Tribune, 2025). POJK ini mendorong bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB)

menghadirkan pembiayaan UMKM yang mudah, cepat, murah, dan inklusif, namun tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian (Bali Tribune, 2025). Pemerintah juga menyalurkan dana kepada bank-bank Himbara untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit kepada UMKM (OJK, 2025).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret untuk meningkatkan akses kredit bagi UMKM di Bali. Peningkatan literasi keuangan, penyederhanaan persyaratan kredit, dan dukungan pemerintah daerah yang lebih intensif akan sangat membantu UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai efektivitas program-program yang ada dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal di Provinsi Bali (Adi, 2025).

3.2 Penggunaan Teknologi Finansial

Teknologi finansial (fintech) telah mengubah lanskap keuangan global, dan Provinsi Bali tidak terkecuali. Fintech menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan akses keuangan, efisiensi, dan inklusi, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan keuangan tradisional (OJK, 2025). Peran fintech sangat signifikan dalam memfasilitasi transaksi, menyediakan pinjaman, investasi, dan layanan keuangan lainnya melalui platform digital (Adi, 2025). Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan fintech menjadikannya pilihan yang menarik bagi masyarakat Bali, terutama UMKM, untuk mengembangkan usaha mereka.

Salah satu peran utama fintech adalah meningkatkan akses keuangan bagi UMKM di Bali. Fintech menyediakan platform pinjaman online yang memungkinkan UMKM untuk mengajukan pinjaman dengan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank konvensional (AFTECH, 2024). Selain itu, fintech juga menawarkan solusi pembayaran digital yang memudahkan UMKM untuk menerima pembayaran dari pelanggan secara online maupun offline (Bank Indonesia, 2024). Hal ini sangat penting bagi UMKM yang beroperasi di sektor pariwisata, di mana transaksi non-tunai semakin umum.

Jenis-jenis fintech yang relevan untuk masyarakat Bali sangat beragam. Pertama, e-wallet atau dompet digital seperti *GoPay*, *OVO*, dan *Dana* sangat populer di kalangan masyarakat Bali untuk pembayaran sehari-hari, transportasi, dan belanja online (iPrice Group, 2025). Kedua, platform peer-to-peer (P2P) lending seperti *Investree* dan *Amartha* menyediakan pinjaman bagi UMKM dengan persyaratan yang lebih fleksibel (OJK, 2025). Ketiga, platform *crowdfunding* seperti *Kitabisa.com* memungkinkan masyarakat Bali untuk menggalang dana untuk berbagai proyek sosial dan bisnis (Kitabisa.com, 2025). Keempat, aplikasi keuangan seperti *Bibit* dan *Bareksa* membantu masyarakat Bali untuk berinvestasi di pasar modal dengan mudah dan terjangkau (Bareksa, 2025).

Adopsi fintech di Bali juga didorong oleh dukungan pemerintah daerah dan Bank Indonesia. Pemerintah Provinsi Bali telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan literasi keuangan digital dan mempromosikan penggunaan fintech di kalangan UMKM (Pemprov Bali, 2024). Bank Indonesia juga mendorong penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai standar pembayaran digital nasional, yang memudahkan transaksi non-tunai di seluruh Indonesia, termasuk Bali (Bank Indonesia, 2024). Selain itu, Bank Indonesia juga mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Rupiah Digital, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran di masa depan (Bank Indonesia, 2024).

Meskipun memiliki potensi yang besar, adopsi fintech di Bali juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan (OJK, 2025). Selain itu, masalah keamanan data dan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian utama (AFTECH, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan literasi keuangan digital, memperkuat regulasi fintech, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan manfaat penggunaan fintech. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai dampak penggunaan fintech terhadap pemberdayaan ekonomi lokal

di Bali, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan keberhasilan fintech di daerah ini (Adi, 2025).

3.3 Hubungan Antara Akses Kredit, Fintech, dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Akses kredit menjadi pilar utama dalam memajukan ekonomi lokal di Bali. Kredit berperan sebagai katalis bagi UMKM untuk berekspansi, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas (Adi, 2025). Ketersediaan akses kredit yang memadai memungkinkan UMKM untuk berinvestasi dalam modernisasi peralatan, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan (Tambunan, 2019). Investasi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional. Peningkatan pendapatan masyarakat dan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi konsekuensi positif dari akses kredit yang memadai (Todaro & Smith, 2015). Fondasi yang kokoh bagi pemberdayaan ekonomi lokal di Bali, yang sebagian besar ditopang oleh sektor UMKM, adalah akses kredit yang mudah dan terjangkau (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, 2024).

Kehadiran teknologi finansial (fintech) membawa angin segar sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan akses kredit yang selama ini menghambat UMKM di Bali. Fintech menawarkan platform pinjaman online yang lebih efisien, sederhana, dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (OJK, 2025). Melalui pemanfaatan teknologi canggih, fintech mampu menjangkau UMKM yang berlokasi di daerah-daerah terpencil dan menyediakan pinjaman dengan persyaratan yang lebih ringan (AFTECH, 2024). Selain itu, fintech juga menyediakan solusi pembayaran digital yang mempermudah UMKM dalam menerima pembayaran dari pelanggan dan mengelola keuangan mereka secara lebih efektif (Bank Indonesia, 2024). Sinergi antara peningkatan akses kredit yang difasilitasi oleh fintech dan penerapan teknologi digital memberikan dampak positif yang signifikan bagi pemberdayaan ekonomi lokal di Bali (Bali Tribune, 2025).

Sebagai ilustrasi konkret, dapat dilihat keberhasilan UMKM pengrajin perak di Celuk, Sukawati, yang mengalami peningkatan signifikan dalam produksi dan penjualan setelah memperoleh pinjaman melalui platform P2P lending (Cnnindonesia.com, 2023). UMKM tersebut sebelumnya menghadapi kendala dalam memperoleh pinjaman dari bank karena keterbatasan agunan dan riwayat kredit yang belum memadai. Namun, berkat fintech, mereka dapat mengajukan pinjaman secara online dengan proses yang cepat dan mudah. Dana yang diperoleh digunakan untuk membeli bahan baku berkualitas tinggi, meningkatkan desain produk, dan memperluas pemasaran melalui e-commerce. Alhasil, pendapatan UMKM tersebut melonjak tajam dan mereka mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, sekaligus melestarikan warisan budaya Bali.

Contoh lain yang relevan adalah pemanfaatan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh pedagang canang sari di pasar tradisional Badung, Denpasar. Dengan adanya QRIS, pedagang dapat menerima pembayaran dari pelanggan secara non-tunai, yang lebih aman, praktis, dan higienis (Bank Indonesia, 2024). Hal ini juga meminimalisir risiko peredaran uang palsu dan mempermudah pencatatan transaksi. Peningkatan penggunaan QRIS di kalangan pedagang tradisional juga didukung oleh program edukasi dan sosialisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah daerah dan Bank Indonesia (Pemprov Bali, 2024). Dengan demikian, fintech tidak hanya menyediakan akses kredit, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat Bali secara menyeluruh.

Selain itu, platform crowdfunding juga telah memberikan kontribusi positif bagi pemberdayaan ekonomi lokal di Bali. Melalui platform ini, UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dapat menggalang dana dari masyarakat luas untuk mewujudkan ide-ide bisnis inovatif dan proyek-proyek sosial yang bermanfaat bagi komunitas (Kitabisa.com, 2025). Contohnya, terdapat inisiatif penggalangan dana untuk mengembangkan ekowisata di Desa Penglipuran, Bangli, yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan

pelestarian lingkungan. Dana yang terkumpul digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung pariwisata, melatih pemandu wisata lokal, dan mempromosikan potensi wisata desa melalui media sosial. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan menjaga kelestarian alam Bali.

Namun, perlu diingat bahwa adopsi fintech di Bali juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kesenjangan literasi keuangan digital di kalangan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan kalangan generasi yang lebih tua (OJK, 2025). Selain itu, isu keamanan data dan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian utama yang memerlukan regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif (AFTECH, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi fintech, dan masyarakat sipil, untuk meningkatkan literasi keuangan digital, memperkuat infrastruktur keamanan siber, dan menciptakan ekosistem fintech yang inklusif dan berkelanjutan di Bali.

4. KESIMPULAN

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa akses kredit perbankan dan penggunaan teknologi finansial memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi lokal di Provinsi Bali. Penyaluran kredit yang terus tumbuh, mencapai Rp115,82 triliun pada semester I tahun 2025, menunjukkan bahwa sektor UMKM tetap menjadi tulang punggung dalam perekonomian daerah. Meskipun pertumbuhan kredit investasi meningkat 14,08%, dominasi sektor konsumtif dalam penyaluran kredit mengindikasikan perlunya diversifikasi lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Fintech berperan penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi UMKM di Bali. Dengan menawarkan platform pinjaman online dan solusi pembayaran digital, fintech memungkinkan UMKM untuk mengajukan pinjaman dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini sangat penting, terutama bagi pelaku usaha yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses kredit dari bank konvensional. Inovasi dalam layanan keuangan ini tidak hanya

mempermudah transaksi, tetapi juga memberikan peluang bagi UMKM untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha mereka.

Kasus konkret menunjukkan dampak nyata dari akses kredit dan fintech. Contoh UMKM pengrajin perak di Celuk yang berhasil meningkatkan produksi dan penjualan setelah mendapatkan pinjaman melalui platform P2P lending mencerminkan potensi besar yang dimiliki sektor ini. Selain itu, penggunaan QRIS di kalangan pedagang tradisional memperlihatkan bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan inklusi keuangan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kombinasi antara akses kredit dan teknologi finansial dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Meskipun demikian, tantangan dalam adopsi fintech di Bali masih ada. Kesenjangan literasi keuangan digital di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan yang perlu diatasi. Selain itu, isu keamanan data dan perlindungan konsumen harus menjadi perhatian utama. Upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem fintech yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih terfokus untuk meningkatkan literasi keuangan, menyederhanakan akses kredit, dan memperkuat regulasi terkait fintech. Dengan langkah-langkah ini, pemberdayaan ekonomi lokal di Provinsi Bali dapat terwujud secara lebih efektif, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi di era digital.

Saran

Pemerintah Provinsi Bali harus memperkuat kebijakan untuk meningkatkan akses kredit bagi UMKM. Langkah ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan persyaratan administrasi untuk pengajuan kredit dan meningkatkan transparansi informasi tentang produk keuangan yang tersedia. Pemberian pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM mengenai cara mengajukan kredit dan mengelola keuangan harus menjadi prioritas. Program-program ini akan membantu

meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri UMKM dalam menggunakan layanan keuangan yang ada.

Perbankan juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan UMKM. Penyediaan produk kredit yang lebih fleksibel, seperti pinjaman tanpa agunan atau pinjaman berbasis arus kas, dapat meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, kolaborasi dengan fintech untuk memanfaatkan platform digital dalam proses pengajuan kredit dapat mempercepat dan mempermudah akses bagi UMKM. Inovasi dalam layanan perbankan harus sejalan dengan upaya untuk menjaga kualitas kredit agar tidak terjadi lonjakan kredit bermasalah.

Asosiasi fintech di Bali harus meningkatkan literasi keuangan digital di masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Program edukasi yang diadakan secara rutin dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan risiko penggunaan teknologi finansial. Peningkatan pemahaman ini akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif menggunakan layanan fintech, sehingga inklusi keuangan dapat meningkat. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan workshop atau seminar tentang teknologi keuangan akan memperkuat kesadaran akan pentingnya literasi finansial.

Perlu juga adanya penguatan regulasi dan perlindungan konsumen terkait penggunaan fintech. Pemerintah dan lembaga pengawas harus memastikan bahwa platform fintech beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Ini termasuk perlindungan terhadap data pribadi pengguna dan penanganan keluhan secara efektif. Keberhasilan fintech dalam memberdayakan ekonomi lokal sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada.

Akhirnya, sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal sangat penting. Program-program yang terintegrasi dan kolaboratif dapat mendorong pertumbuhan UMKM dan memaksimalkan dampak positif akses kredit dan teknologi finansial. Dengan strategi yang holistik, Provinsi Bali dapat

mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Rektor Universitas Tabanan atas dukungan dan inspirasi yang tiada henti dalam pengembangan penelitian di bidang ekonomi pembangunan. Penghargaan juga kami sampaikan kepada pengelola jurnal JIS Siwirabuda yang telah memberikan platform yang sangat berharga bagi peneliti untuk menerbitkan karya ilmiah. Komitmen dan profesionalisme Anda dalam memajukan ilmu pengetahuan sangat berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi lokal di Provinsi Bali. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut, membawa manfaat yang luas bagi masyarakat dan akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2025). Peran Akses Kredit dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 45-60.
- AFTECH. (2024). Laporan Industri Fintech Indonesia 2024. Jakarta: Asosiasi Fintech Indonesia.
- Avantee. (2023). Menggunakan P2P Lending untuk Mendukung UMKM: Studi Kasus Sukses. Diakses dari <https://avantee.co.id/blog/detail/menggunakan-p2p-lending-untuk-mendukung-umkm-studi-kasus-sukses>
- Bank Indonesia. (2024). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). QRIS: Standar Nasional Pembayaran Digital.
- Bareksa. (2025). Investasi Mudah dengan Aplikasi Bareksa.
- Beck, T., & Demircuc-Kunt, A. (2006). Small and Medium Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint. *Journal of Financial Economics*, 7(3), 234-256.
- Cnnindonesia.com. (2023). Kisah UMKM Kerajinan Perak di Bali yang Mendunia Berkat P2P Lending.
- Dekranasda Provinsi Bali. (2025). Dukung Literasi Keuangan UMKM di Era Digital, Dekranasda Provinsi Bali laksanakan Webinar inspiratif bertema "Edukasi Perlindungan Konsumen

- dalam Transaksi Keuangan". Diakses dari https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/77_dukung-literasi-keuangan-umkm-di-era-digital-dekransda-provinsi-bali-laksanakan-webinar-inspiratif-bertema-edukasi-perlindungan-konsumen-dalam-transaksi-keuangan
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali. (2024). Data UMKM di Provinsi Bali. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Dwiastuti, N., & Suardana, I. B. R. (2020). Pengaruh Kepercayaan, Selisih Bunga Kredit Dengan Bank Konvensional, Dan Kemudahan Proses Kredit Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Layanan Fintech Berbasis Pinjaman Online: Studi Kasus Di PTN dan PTS Provinsi Bali. *TIERS Information Technology Journal*, 1(2).
- Hadayani, D. O., Delinah, & Nurlina. (2020). Prosiding seminar nasional pendidikan program pascasarjana universitas pgri palembang 10 januari 2020. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, 293-306.
- Kosasih, J. I. (2019). Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank. Sinar Grafika.
- Kusuma, & Asmoro. (2021). Penggunaan teknologi finansial dalam meningkatkan akses keuangan bagi UMKM oleh bank perkreditan rakyat. *JURNAL STKIP PGRI JOMBANG*.
- Nusa Bali. (2022). Akses Modal dan Bahan Baku Jadi Kendala UMKM di Bali. Diakses dari <https://www.nusabali.com/berita/129853/akses-modal-dan-bahan-baku-jadi-kendala-umkm-di-bali>
- OJK. (2025). Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-19-Tahun-2025-Kemudahan-Akses-Pembiayaan-Kepada-UMKM.aspx>
- OJK. (2025). Penyaluran Kredit Perbankan di Bali Tembus Rp115,82 T Semester I 2025, OJK: Intermediasi Perbankan Masih Solid. Diakses dari <https://indonesia.jakartadaily.id/ekonomi-bisnis/69315920416/penyaluran-kredit-perbankan-di-bali-tembus-rp11582-t-semester-i-2025-ojk-intermediasi-perbankan-masih-solid>
- Pemprov Bali. (2024). Program Literasi Keuangan Digital untuk UMKM. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Pratiwi, I Gusti Ayu Made Agung Mas Andriani Pratiwi. 2022. Analisis Peran Literasi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha dan Kesejahteraan Pengrajin Perak di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 8(2), 186-197.
- Pratiwi, I Gusti Ayu Made Agung Mas dan Suarabawa, I Wayan. 2024. Peran Pinjaman Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *Jurnal Ganec Swara*, 18(4), 2545-2553.
- Prayitno, E., Tarigan, N., Sukmawaty, W., & Maudzoh, U. (2022). Kebangkitan UMKM Pascapandemi Covid-19. *Kebangkitan UMKM Pascapandemi Covid-19*, 2(4), 4787-4794.
- Radar Bali. (2022). Pelaku UMKM di Bali Tercekik, Akses Modal dan Bahan Baku Pun Kian Susah. Diakses dari <https://radarbali.jawapos.com/denpasar/70863808/pelaku-umkm-di-bali-tercekik-akses-modal-dan-bahan-baku-pun-kian-susah>
- Siregar, E., Faizal, E., & Iskandar, E. (2023). Peran Financial Technology Bagi UMKM. *Edunomika*, 8(2).
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Wardani, N., & Darmawan, D. (2020). Konsep Financial Technology. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 8(1), 56-70.